

BAB VI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, M, 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*. UII Press, Yogyakarta.
- Andi Fahmi Lubis, *et.al*, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks*, GTZ GmbH, Jakarta.
- Arief, M. &. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT Alumni: Bandung.
- Asshiddiqie, J, 2016, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Atmasasmita, R, 2010, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- F.Turner, C. K, 1971, *Anti-Trust Policy and Economics and Legal Analys*, Havard University, Cambridge.
- Hamzah, A, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. PT Sofmedia, Medan.
- _____, 2014, *Peraturan PerUndang-Undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, PT Sofmedia, Medan.
- Hartanti, E, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Hiariej, E. O, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Howard, M. C. 1983, *Antitrust Law and Trade Regulation, Selected Issues and Case Studies*, Englewood Cliffs, New Jersey, USA.
- Ibrahim, J, 2006, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang.
- Kaelan, H, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Administrasi Internasional, 2007, *Strategi Penanganan Korupsi di Negara-Negara Asia Pasifik*. Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

- Limbong, B, 2013, *Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi*, Margharet Pustaka, Jakarta.
- Makaro, S. D, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mulyadi, L, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT Alumni, Bandung.
- Ohanga, M, 2010, *Cartel Criminalisation (Discussion Document for Regulatory Impact Assesmen)*, Ministry of Economic Development, New Zeland.
- P, M. D, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Putong, I, 2013, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Rokan, M. K, 2010, *Hukum Persaingan Usaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Semma, M, 2008, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Setiyono, H, 2005, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Shapiro, R. S, 1996, *Glosarry of Industrial Organisation Economics and Competition Law*, OECD, Paris.
- Sirait, N. N, 2003, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Siswanto, A, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Sumardi, T. P, 2010, *Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha*, The Indonesia Netherlands National Legal Refrom Progam (NRLP), Jakarta.
- Sumardjono, M. S, 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian (Sebuah Pedoman Dasar)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunyoto, E. U, 2014, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Center For Academic Publishing Service, Jakarta.
- Tjandra, R, 2009, *Hukum Keuangan Negara*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Usman, R, 2004, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wiyono, R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal

- Agustino, D, “Faktor Penentu Dampak Aktivitas Antipersaingan dan Pengecualian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf G”, *Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 1*, 2009.
- Bayraktar, B, “The Role Of Private Sector Investments in The Economic Performance Of OIC Members Countries”, *Jurnal Of Economic Cooperation*, 24, 1, 2003.
- Berinde, M, “Cartels-Between Theory, Leniency Policy and Fines”, *Annals Of Faculty Of Economics, Vol.01, Issue.1*, 2008.
- E Tandiawan, A. N, “Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kesempatan Kerja di Kota Manado Tahun 2001-2002”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 15, No 01*, 2015.
- Fadri, I, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Vol.17, No.3*, 2010.
- H Monarchy, I. N, “Reformulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kartel” *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Kaufman, J. H, “Confronting The Challenge Of State Capture in Transsition Economies, Finance & Development”, *A Quartely Magazine Of The IMF, Vol.38, No.3*, 2001.
- P, A. A, “Korupsi Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan”, *Jurnal RechtVinding, Vol.3, No.3*, 2014.
- Situmorang, M, “Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi Dengan United Nation Convention Against Corruption”, *Jurnal RechtsVinding, Vol.3, No.3*, 2014.
- Soemardi, T. P, Peran Undang-Undang dan Kelembagaan Persaingan Usaha Suatu Negara Dalam Prespektifnya Daya Saing Bangsa Menghadapi Pasar Bebas dan Globalisasi”, *Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 4*, 2010.
- Suhara, J. J, “Redefinisi Asas dan Tujuan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Sebagai Dasar Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 1*, 2009.
- Sujatmiko, I. (t.thn.).Hypercorruption dan Strategi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.2, No. 1*.
- Sukarmi, “Pembuktian Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha” *Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi 6*, 2011.

Supriyadi, “Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Vol.27, No.3, 2015.*

Titis Anindyajati, I. R, “Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan PerUndang-Undangan(The Constitutionality Of Criminal Sanction Norms as Ultimum Remedium in The Making Of Laws)”, *Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.4, 2015.*

Toruan, H. D, Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Legal Implications Of Bank Loans Turn Into Corruption). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No 1, 2016.*

Wiriadinata, W, “Corruption In Electricity Stealing According To Article 2 Paragraph (1) Of Law Number 31 Of 1999 On Corruption Crime Eradication” *Global Journal Of Political Science and Administration, Vol.2, No.5, 2014.*

Yosefa, D, “Efisiensi dan Pelaksanaan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Persaingan Usaha KPPU, Edisi.3, 2010.*

C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2013, *Kajian Kebijakan Tata-Niaga Komoditas Strategis : Daging Sapi*, Hasil Penelitian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Kumalasari, E, 2010, *Dasar-Dasar Kerugian Keuangan Negara Sebagai Sala Satu Delik Korupsi Terhadap Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

M, F. F. (2016). Tinjauan Hukum Terhadap Dugaan Praktik Kartel Dalam Impor Daging Sapi. *Skripsi, Progam Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin*. Makasar.

D. Makalah/Pidato

Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, *Pidato*, Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada di Sitinggil, Yogyakarta, 19 Desember 1955.

Puccio, G. F, *Corruption and The Private Sector : A Reviews Of Issues*, Paper Oxford Policy Management, EPS-PEAKS, Inggris, Februari 2013.

E. Artikel dalam Antologi dengan Editor

Atmasasmita, R, Korupsi Tindak Pidana Luar Biasa. Dalam E. W. Candra, 2016, *Pemikiran Romli Atmasasmita (Tentang Pemberantasan Korupsi di Indonesia)*, Kencana, Jakarta.

Gregory J.W, S. D, Deterrence And Detection Of Cartels : Using All The Tools And Sanctions. Dalam J. Fredricks, 2011, *Antitrust Bulletin*, ABA Center For Continuing Legal Education, Florida.

F. Artikel Majalah atau Koran

Ahmad, T, Korupsi dan Persaingan Usaha, *Kompetisi (Media Berkala Komisi Pengawas Persaingan Usaha)*, Edisi 3, 2006.

Akbar, M. F, Sulitnya Untuk Korupsi, *Jawa Pos*, 11 Febuari 2017.

Manan, B, Penegakan Hukum Dalam Perkara Pidana, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun*, Tahun XXV No 296, 2010.

_____, Revitalisasi dan Reorientasi Penegakan Hukum di Indonesia. *Varia Peradilan Majalah Hukum*, Tahun XXVII No 314, 2012.

G. Internet

ACCH, Upaya KPK Menangani Korupsi di Sektor Swasta, <https://acch.kpk.go.id/id/ragam/makalah/upaya-kpk-menangani-korupsi-di-sektor-swasta>, diakses pada tanggal 2 Juni 2016.

HukumOnline, Mempersoalkan Sanksi Pidana Hukum Persaingan Usaha, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21865/mempersoalkan-sanksi-pidana-dalam-hukum-persaingan-usaha>, diakses pada tanggal 30 April 2009.

ICW, Korupsi di Sektor Swasta, <http://www.antikorupsi.org/id/content/korupsi-di-sektor-swasta>, tulisan ini disalin dari Jawa Pos diakses pada 14 Oktober 2009.

VIVANEWS, Ngeri Kartel Pengusaha Daging Ayam Rugikan Negara Rp 300 T, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/771253-ngeri-kartel-pengusaha-daging-ayam-rugikan-negara-rp300-t/1>, diakses pada tanggal 11 Mei 2016.

H. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi untuk menjelaskan terkait dengan haluan negara dalam bidang ekonomi.

Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400).

Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Didalam Perkara Tertentu .(Nomor :05/Bua.6/Hs/SP/Viii/2011).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administrasi (Ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2009).

I. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 PK/Pid.Sus/2012 perihal Peninjauan Kembali perkara Drs. H. Edwan Nizar, M.Si, tanggal 30 September 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi No 25/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Januari 2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 23 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 25 Juli 2006 .

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/Pid.Sus/2010/PN.Bjm perihal Peradilan Tingkat Pertama perkara PT. Giri Jaladhi Wana, tanggal 9 Juni 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST perihal Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49454/PP/M.XII/99/2013 perihal Gugatan pajak Penghasilan Pajak, tanggal 25 Oktober 2012.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02/KPPU-I/2016 perihal Pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengaturan Produksi Bibit Ayam Pedaging (Broiler) di Indonesia, 13 Oktober 2016.

Putusan KPPU No 24/KPPU-I/2009 perihal Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, tanggal 4 Mei 2010.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-I/2015 perihal Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perdagangan Sapi Impor di Jakarta, tanggal 22 April 2016.